

**NAGARI TARAM PASCA (PEMERINTAHAN REVOLUSIONER
REPUBLIK INDONESIA): STUDI TENTANG DOMINASI PKI
(1961-1966)**

Skripsi

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan
Strata Satu (S1) pada Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri
Padang*



OLEH :

**Abenk Pratama Putra
2007/84578**

**JURUSAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

**HALAMAN PENGESAHAN LULUS
UJIAN SKRIPSI**

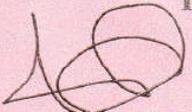
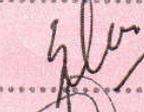
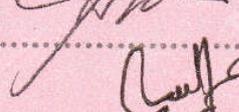
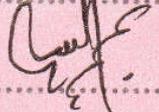
**Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Pada tanggal 31 Juli 2013**

**NAGARI TARAM PASCA PRRI(PEMERINTAHAN REVOLUSIONER
REPUBLIK INDONESIA) : STUDI TENTANG DOMINASI PKI
(1961-1966)**

Nama : Abenk Pratama Putra
Bp/NIM : 2007/84578
Jurusan : Sejarah
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 04 September 2013

TIM PENGUJI

		Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Etmi hardi, M.Hum	1..... 
Sekretaris	: Drs. Gusraredi	2..... 
Anggota	: 1. Drs. Zul Asri, M.Hum	3..... 
	2. Hendra Naldi, SS, M.Hum	4..... 
	3. Abdul Salam, S.Ag, M.Hum	5..... 

ABSTRAK

Abenk Pratama Putra, (2007/84578) : Nagari Taram Pasca PRRI(Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia): Studi Tentang Dominasi PKI(1961-1966). **Skripsi:** Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Universitas Negeri Padang

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang dampak dari pergolakan PRRI yang dimanfaatkan oleh PKI untuk menjalankan program-program politiknya, di antaranya melalui kegiatan-kegiatan sabotase, aksi sepihak, dan aksi terror. Yang menarik di sini yaitu perlakuan yang diterima oleh aktifis PKI tidak sama dengan daerah lain, setelah partai ini dinyatakan terlarang, yaitu setelah terjadi gerakan 30 September tahun 1965. Adapun tujuan dari penulisan ini untuk mengungkapkan perkembangan politik di Nagari Taram pasca PRRI khususnya Partai Politik PKI dan bentuk dominasi yang dilakukan PKI di Nagari Taram pasca PRRI.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, yang bersifat deskriptif analitis. Sesuai dengan prosedur penelitian sejarah, maka studi ini dilakukan dengan beberapa tahap. Data primer dilakukan wawancara dengan informan, Kedua, kritik sumber yaitu menetapkan informan sesuai dengan kriteria yang diperlukan. Ketiga, analisis, sintesis, dan interpretasi data. Keempat, adalah penulisan yang bisa dipertanggung jawabkan (historiografi), yaitu penulisan yang bisa disusun sistematis, utuh, komunikatif dalam bentuk skripsi.

Dari penelitian ini dapat dikemukakan bahwa berakhirnya PRRI dalam kenyataannya tidak membuat kehidupan masyarakat Minangkabau secara umum dan masyarakat Taram secara khusus lebih aman, situasi ini dimanfaatkan PKI untuk kepentingan politiknya, kekosongan pemimpin atau wali Nagari yang ikut ijok dimasa PRRI dan kekosongan organisasi sosial politik yang anti PKI menjadi faktor dominasinya PKI di Taram. PKI sangat kuat dimasa itu dan juga sangat kejam dalam melakukan praktek kekerasan pada lawan politiknya. sehingga sebagian besar masyarakat Taram melakukan *Ijok*, tidak ada organisasi politik yang dapat membendung perkembangan politik PKI, semua aspek politik, sosial bahkan ekonomi pun di bawah kekuasaan PKI. Di Taram, semenjak meletusnya pergolakan PRRI, PKI merupakan dominasi tunggal yang kuat dan kejam pada praktek lawan politiknya. Hal ini berlangsung lama sampai hingga PKI dinyatakan menjadi Partai politik terlarang.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang melimpahkan rahmat, hidayah dan Ridha-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Jurusan sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang dan berhasil menyusun skripsi dengan judul **”Nagari Taram Pasca PRRI(Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) studi: Tentang dominasi PKI**

Selawat beriringan salam disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan hingga alam berilmu pengetahuan seperti saat ini kita rasakan. Dengan selesainya penulisan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Etmi Hardi, M.Hum selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Gusraredi selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi serta kesabaran membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Zul Asri, M.Hum, Bapak Abdul Salam, S.Ag, M.Hum dan Hendra Naldi, SS, M.Hum terima kasih telah memberikan saran dan kritikan demi kesempurnaan skripsi ini.
3. Orang Tua tercinta ayahanda Afrizal dan ibunda Efrida. yang telah memberikan dukungan do`a, moril dan materil kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial beserta Staf dan Karyawan yang telah memberikan kemudahan dalam administrasinya.

5. Bapak Ketua dan Sekretaris Jurusan serta staf pengajar Jurusan Sejarah Universitas Negeri Padang, yang telah memberikan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Terima kasih kepada para informan yang telah bersedia memberi data dan informasi kepada penulis. Bapak Anwarbey Dt. Tumenggung nan Panjang dan Ahmad Bahir Dt. Katumanggungan nan Kuniang
7. Rekan-rekan mahasiswa/i Sejarah, khususnya angkatan 2007 dan pihak-pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan pada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga atas bimbingan, bantuan dan doa tersebut dapat menjadi amal saleh dan mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya dengan segala kekurangan dan keterbatasan penulis, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak umumnya dan penulis khususnya. Atas kritik dan sarannya penulis ucapkan terima kasih.

Padang, 25 Juli 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Dan Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian	10
BAB II SEKILAS TENTANG NAGARI	
TARAM.....	13
A. Geografis dan Keadaan Alam	13
B. Sejarah Awal Mula Nagari Taram	16
C. Kehidupan Sosial Ekonomi	20
D. Struktur Masyarakat.....	24
BAB III PERKEMBANGAN POLITIK NAGARI TARAM PASCA	
PERGOLAKAN PRRI.....	29
A. Gambaran Politik di Nagari Taram.....	29
B. Kekalahan PRRI Menguntungkan PKI.....	35
C. PKI setelah Pristiwa PRRI.....	38
D. PKI dan Aktifitas Politiknya.....	41
E. Pristiwa G 30 S Tahun 1965 dan Kehancuran PKI di Taram.....	44
BAB IV KESIMPULAN	48
DAFTAR PUSTAKA	51
DAFTAR INFORMAN	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberontakan¹ PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) yang berlangsung pada tahun 1958 dan beberapa tahun setelahnya menggoreskan trauma yang sangat mendalam bagi masyarakat Sumatera Barat sebagai sebuah tragedi perjuangan. Berahirnya perjuangan PRRI ditandai dengan menyerahnya Achmad Husein dan kawan-kawan seperjuangan pada tanggal 29 Mei 1961 dan menggabungkan diri pada pemerintahan pusat maka pergolakan PRRI dianggap telah selesai.²

Peristiwa itu telah membawa daerah ini sebagai sasaran operasi Pemerintahan Pusat, yang mana operasi militer dari pemerintahan Pusat telah memporak-porandakan kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya daerah.³ Tidak sebatas itu saja goncangan kulturpun terjadi dengan memikul “kebanggaan” dan “rasa percaya diri” orang Minangkabau yang tumbuh subur dalam kurun waktu sebelumnya.⁴

¹ Bagi pemerintahan pusat pergolakan PRRI merupakan bentuk penentangan daerah terhadap pemerintahan pusat, sehingga bagi pemerintahan pusat PRRI dinyatakan adalah sebuah *pembrontakan*.

² Syamdani, *PRRI Pembrontakan atau Pergolakan sebuah: tinjauan historis*, Skripsi. (Padang : Universitas Negeri Padang, 2000)

³ Mestika Zed, dkk, *Sumatra Barat di Panggung Sejarah 1945 – 1995*. (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1998), hal. 157.

⁴ Ibid

Dampak dari PRRI ini tidak hanya dirasakan oleh pendukung pemberontak saja namun juga mereka yang bermukim di rantau, semua orang Minangkabau merasakan pahitnya sehingga harus menerima penghinaan sebagai "Pemberontak" yang "Kalah". Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula, sudah kalah sebagai pemberontak, malu serta hinaan terus terlontar pada mereka yang diduga PRRI, ditambah teror dan intimidasi yang dilakukan kaki tangan PKI yang pengaruhnya semakin kuat selama dan sesudah peristiwa PRRI.⁵

Ketika pemberontak PRRI dikalahkan pulang kampung pada tahun 1961 mereka tergantung pada kebaikan pemimpin-pemimpin nagari ini, karena itu tetap tidak aktif dan diam untuk menghindari tuduhan anti revolusi. Banyak dari mereka merasa, bahwa untuk melindungi keluarga dan hidup mereka, mereka harus bekerja sama dengan lembaga yang berafiliasi komunis. Dimasa politik PKI jika ada seseorang yang mau mengurus surat-surat atau minta tanda tangan kepala nagari yang Komunis, itu sangat sukar jika bukan PKI atau simpatisannya, mungkin akan lebih sukar lagi kalau dia mantan atau diduga sebagai PRRI.⁶

Kekalahan PRRI dimanfaatkan oleh PKI untuk menciptakan revolusioner, selain dilakukan melalui kegiatan-kegiatan politik yang hebat, juga melalui kegiatan-kegiatan sabotase, aksi sepihak, dan aksi teror⁷. Salah satunya adalah Nagari Taram termasuk Luhak 50 Kota yang dimanfaatkan PKI untuk memperkuat kedudukannya, sehingga kedudukan PKI semakin kokoh di Nagari ini sebagai penguasa tunggal.⁸

⁵ Mestika Zed, dkk, *Sumatra Barat di Panggung Sejarah 1945 – 1995*. (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1998) hal. 164

⁶ Audrey Kaihin, Pengantar Taufik Abdullah, *Dari Pemberontakan Ke Integrasi, Sumatra Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*. (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2005), hal 368

⁷ Perpustakaan Nasional. *Gerakan 30 september Pemberontakan Partai Komunis Indonesia*. (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1994) , hal 49

⁸ Harsja. W. Bachtiar, "Negeri Taram : Masyarakat Desa Minangkabau", dalam *Masyarakat Desa di Indonesia*, (Fakultas Ekonomi UI, 1984), Hal242.

Sebelum pergolakan PRRI berlansung, cabang-cabang politik yang ada di Nagari Taram sejak keluarnya maklumat No. X Pemerintah Republik Indonesia (RI) tahun 1945 adalah partai Masyumi, Perti, PKI, dan PNI⁹. Namun Partai Politik yang mendominasi politik di Nagari Taram sebelum dan sampai pergolakan berlansung adalah Masyumi, karena partai ini kuat di Nagari Taram bahkan di Sumatra Barat umumnya¹⁰, sedangkan PKI dimasa itu tidak menampakan perannya sebagai salah satu partai yang ada di Nagari Taram. Namun dimasa PRRI dan sesudahnya, PKI mendominasi politik di Nagari Taram, adapun penyebabnya yaitu Masyumi pendukung PRRI dan partai ini juga dilarang untuk ikut dalam kancah politik.¹¹

Hal lain yang menyebabkan PKI mendominasi politik di Nagari Taram adalah tokoh-tokoh PKI untuk tingkat Kabupaten banyak yang berasal dan berdomisili di Taram seperti Jauharden, Nuraya Zed, Fituhan Dt. Paduko Basah, Si Godang, dan Marisan, sehingga setelah kekosongan politik di masa PRRI, kader-kader PKI naik menjabat sebagai Wali Nagari menggantikan Wali Nagari yang ikut PRRI.¹²

Bila dibandingkan dengan Nagari-nagari lain di Sumatera Barat, Nagari Taram termasuk Nagari yang dominan PKI, diperkirakan jumlah orang PKI di

⁹ Wawancara dengan Anwarbay Dt. Tumanggung nan Panjang di Taram Tanggal 26 April 2012

¹⁰ Wawancara dengan Anwarbay Dt. Tumanggung nan Panjang di Taram Tanggal 26 April 2012

¹¹ *Ibid*

¹² Wawancara dengan A. Bahir Dt. Katumanggungan Nan Kuniang di Taram Tanggal 20 Juni 2012

Nagari Taram pada awal tahun 1965 adalah sebanyak 222 orang.¹³ Aksi teror yang dilakukan oleh PKI di Taram sama kejamnya dengan nagari lain di Sumatera Barat. Akan tetapi yang menarik di sini yaitu perlakuan yang diterima oleh aktifis PKI tidaklah sama setelah partai ini dinyatakan terlarang, yaitu setelah terjadi gerakan 30 September tahun 1965, Nagari lain di Kecamatan Payakumbuh Kabupaten 50 Kota mengganyang aktivis PKI yang bernama Datuak Siri (Ketua PKI di Kab. 50 Kota) sampai mati.¹⁴ Sedangkan orang-orang PKI yang berpengaruh di Nagari Taram tidak mendapat pembalasan yang kejam dan setimpal dari masyarakat Taram.

Pembahasan tentang Nagari Taram sudah pernah dikemukakan oleh Harsja. W. Bachtiar melalui artikelnya yang berjudul *Negeri Taram : Masyarakat Desa Minangkabau*. Namun didalam masih sedikit menjelaskan keberadaan partai-partai Politik terutama sesudah PRRI. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan belum ada yang menulis mengenai Nagari Taram pasca PRRI terlebih, mengenai dominasi PKI. Berdasarkan itulah maka penulisan ini diberi judul **“Nagari Taram Pasca PRRI(Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia): Studi Tentang Dominasi PKI(1961-1966) ”**.

¹³ Wawancara dengan Anwarbay Dt. Tumanggung nan Panjang di Taram Tanggal 25 juni 1 2012

¹⁴ Amran Nasution dan Fachrul Rasyid, “akhir perjalanan sang Datuak” *Tempo*, No.6. Tahun XVIII, 9 April 1988, hal 28.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Batasan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi batasan temporal dan batasan spasial. Untuk batasan temporalnya diambil periode tahun 1961-1966. Tahun 1961 diambil sebagai batasan awal penulisan karena pada tahun „tersebut akhir dari pembantaian PRRI yang berakibat “merajalelanya” PKI di Nagari Taram. Tahun 1966 diambil sebagai batasan akhir karena pada tahun tersebut PKI dianggap sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia, sehingga orang-orang PKI tidak mendapat tempat lagi di Nagari Taram. Sedangkan batasan spasialnya adalah Nagari Taram, merupakan salah satu Nagari di Kabupaten 50 Kota yang dapat disusupi PKI dan mampu memperkuat kedudukannya.

Untuk memperjelas permasalahannya yang akan dibahas dalam penulisan ini, dirumuskan beberapa pertanyaan yaitu:

1. Bagaimana perkembangan politik di Nagari Taram pasca PRRI khususnya Partai Politik PKI?
2. Apa saja program-program yang dilakukan PKI di Nagari Taram pasca PRRI?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini untuk mengungkapkan perkembangan politik di Nagari Taram pasca PRRI khususnya Partai Politik PKI dan bentuk dominasi yang dilakukan PKI di Nagari Taram pasca PRRI

Tulisan ini diharapkan bermanfaat untuk mengetahui keadaan politik Nagari Taram khususnya setelah berakhirnya PRRI perjalanan serta dapat melihat sejauh mana dominasi politik dari PKI, selain itu diharapkan juga dari penulisan ini bermanfaat bagi pembaca untuk sumber bacaan yang berguna dan sebagai bahan acuan penulis.

D. Tinjauan Pustaka

1. Studi Relevan

Salah satu tulisan tentang PRRI dikemukakan oleh Mestika Zed, *Sumatra Barat di panggung sejarah 1945-1995*. Buku ini menjelaskan tentang keberadaan Sumatra Barat dari masa kemerdekaan sampai Orde Baru, yang mana dalam beberapa bab membahas tentang PRRI yaitu sebab lahirnya PRRI dan juga membahas keadaan Sumatra Barat sesudah PRRI yang tidak menentu dan menyebabkan terjadinya merantau orang Minangkabau karna harga diri dan tekanan politik PKI.¹⁵

Penulisan PRRI dan sesudahnya juga dibahas oleh Syamdani dalam skripsinya yang berjudul *PRRI Pembontakan Atau Sebuah Pergolakan Sebuah: Tinjauan Historis* dalam tulisannya dijabarkan apakah PRRI itu sebuah pambontakan atau sebuah pergolakan, sebab PRRI ini berdampak bagi imet orang Minangkabau dimata Pemerintah pusat sebagai permbrontak adapun akibatnya terjadinya penghinaan, penahanan, dan pengasingan secara politis, dan pengucilan

¹⁵ Mestika Zed, dkk, *Sumatra Barat di Panggung Sejarah 1945 – 1995*. (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1998)

bagi pelaku PRRI (dampak psikologis dari lingkungan masyarakat) serta eksodus besar-besaran untuk menghindari dampak psikologis yang lebih besar.¹⁶ Tergambar bagaimana beban berat yang dipikul orang Minangkabau selain dicap sebagai pemberontak ditambah lagi dengan tekanan dari pemerintah pusat dan masyarakat terhadap pelaku PRRI

Selanjutnya Hera Hastuti dalam Skripsinya *Nagari Paninggahan pada masa PRRI (1958-1961)*. Melalui skripsinya ia menggambarkan bagaimana nagari Paninggahan dimasa PRRI, karena Nagari Paninggahan merupakan salah satu wilayah yang dijadikan basis perjuangan oleh tentara PRRI serta menggambarkan bentuk geografis wilayah yang strategis bagi PRRI serta dalam skripsi ini dijelaskan pula bagaimana peran masyarakat serta nagari itu dimasa PRRI.¹⁷

Harsja. W. Bachtiar melalui artikelnya yaitu berjudul *Nagari Taram : Masyarakat Desa Minangkabau*. Melalui artikelnya ia sedikit membahas tentang keberadaan partai-partai politik yang ada di Nagari Taram pada masa sebelum PRRI dan sesudahnya.¹⁸

Berdasar permasalahan yang dikaji dalam literatur yang ditulis Mestika Zed, artikel yang ditulis Harsja. W. Bachtiar, dan skripsi yang ditulis Syamdani dan Hera Hastuti di atas terlihat adanya keterkaitan permasalahan dengan objek yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama tentang PRRI sedangkan artikel

¹⁶ Syamdani, *PRRI Pembontakan atau Pergolakan sebuah: tinjauan historis*, Skripsi. (Padang : Universitas Negeri Padang, 2000)

¹⁷ Hera Hastuti, *Nagari Paninggahan Masa PRRI 1958-1961*. (Padang: Universitas Negeri Padang, 2010)

¹⁸ Harsja. W. Bachtiar, "*Negeri Taram : masyarakat desa di Indonesia masa ini*. (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 1984) hal. 74

Harsja. W. Bachtiar memiliki kesamaan tempat/lokasi penelitian dimana lokasinya yaitu Nagari Taram. Sedangkan Skripsi dan literatur yang membahas tentang pasca PRRI khususnya tentang Dominasi PKI di Nagari Taram belum ada.

2. Kerangka Konseptual

Nagari adalah pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Istilah nagari menggantikan istilah desa, yang sebelumnya digunakan di seluruh provinsi-provinsi lain di Indonesia. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nagari dipimpin oleh seorang wali nagari, dan dalam menjalankan pemerintahannya, dahulunya wali nagari dibantu oleh beberapa orang wali jorong, Nagari bukan merupakan bagian dari perangkat daerah jika berada dalam struktur pemerintahan kota. Berbeda dengan kelurahan, nagari memiliki hak mengatur wilayahnya yang lebih luas. Nagari merupakan bentuk dari republik mini.¹⁹

Istilah nagari juga dikemukakan oleh Datuak Batuah yang dikutip oleh Tsuyosi Kato dalam bukunya *Adat Minangkabau dan Merantau (Dalam Perspektif Sejarah*. 2005) Nagari adalah suatu unit teritorial yang mempunyai struktur dan

¹⁹http://www.sumbarprov.go.id/detail_artikel.php?id=537

aparatus hukum sendiri. Nagari adalah unit pemukiman yang paling sempurna yang diakui oleh adat.²⁰

Taram (sekarang masuk Kecamatan Harau) adalah salah satu nagari yang cukup terkenal di Luhak 50 Koto. Di nagari ini ditemukan beberapa peninggalan megalitik berupa bekas-bekas tempat tinggal manusia gua. Nagari Taram pernah mendapat perhatian khusus oleh antropolog Harsja W. Bachtiar, seperti terefleksi dalam artikelnya: “Nagari Taram: A Minangkabau Village Community”, dalam: Koentjaraningrat (ed.), *Villages in Indonesia* (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1967: 348-385). Nagari Taram, dan juga nagari-nagari lainnya di Minangkabau, yang memiliki keindahan alam dan keunikan budaya setempat tersebut oleh adak salingka nagari, adalah potensi wisata yang justru kita abaikan setelah kolonialisme pergi dari negara ini.²¹

Politik menurut B. H. Marbun S.H adalah suatu bagian pola warga Negara yang memperjuangkan kepentingan politik tertentu. Menurut Aristoteles, selama manusia menjadi makhluk sosial selam itu pula kita menemukan politik. Ini berarti dalam kehidupan bersama, manusia memiliki hubungan yang khusus yang diwarnai oleh adanya aturan yang mengatur kehidupan itu ada kekuasaan dan wewenang yang dipegang oleh segelintir orang yang sekaligus melahirkan aturan.²² Miriam Budiardjo mendefinisikan Politik sebagai macam kegiatan yang terjadi di suatu Negara yang menyangkut proses menentukan tujuan dan

²⁰ Tsuyosi Kato, *Adat Minangkabau dan Merantau (Dalam Perspektif Sejarah)*. (Jakarta: Balai Pustaka. 2005) hal. 27

²¹ Harsja. W. Bachtiar, “Negeri Taram : masyarakat desa*OP. Cit*

²² Drs. Philipus. *Sosiologi Dan Politik*. (Djakarta: PT Raja Grafindo, 2009) hal. 89

bagaimana cara mencapai tujuan itu²³. Dan masih terkait politik juga dikenal istilah Dominasi Politik yang berarti Penguasaan oleh pihak yang lebih kuat terhadap yang lebih lemah dalam bidang politik.²⁴

Partai politik merupakan lembaga untuk mengemukakan kepentingan, baik secara sosial maupun ekonomi, moral maupun materil. (Nurul,90-91). Maurice Duverger: partai politik adalah sekelompok manusia yang mempunyai doktrin yang sama. Miriam Budiardjo: partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisasi, yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama.²⁵

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, yang bersifat deskriptif analitis. Sesuai dengan prosedur penelitian sejarah, maka studi ini dilakukan dengan beberapa tahap.

Pertama, heuristik yaitu menjajaki dan mengumpulkan data tentang Nagari Taram pasca PRRI(Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) baik bersifat primer maupun bersifat sekunder. Dalam memperoleh data primer dilakukan wawancara dengan sumber yang dianggap mampu menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan Nagari Taram pasca PRRI(Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia). Wawancara dilakukan dengan dua cara yaitu wawan cara

²³ Ibid. Hal 90

²⁴ B. H. Marbun S.H. *Kamus Politik*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2002)

²⁵ Philipus. *Sosiologi Dan Politik*. (Djakarta: PT Raja Grafindo, 2009) hal 121

berstruktur yakni mempersiapkan pertanyaan sesuai dengan masalah-masalah penelitian.

Kemudian wawancara tidak berstruktur yaitu pertanyaan yang tidak dipersiapkan lebih dahulu, hal ini dilakukan untuk melengkapi data yang diperlukan. Disamping itu untuk melengkapi data tentang Nagari Taram pasca PRRI(Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) ini digunakan studi kepustakaan guna mendapatkan buku yang relevan sebagai bahan rujukan. Studi kepustakaan ini dilakukan pada perpustakaan Universitas Negeri Padang, Ruang Baca FIS, Labor Jurusan Sejarah, dan Pustaka Daerah Sumatera Barat.

Kedua, kritik sumber yaitu melakukan pengujian data yang ditemukan dengan melakukan kritik eksternal yaitu melakukan pengujian otentisitas (keaslian). Sementara kritik internal dilakukan untuk menguji kesahihan isi informasi tentang Nagari Taram pasca PRRI(Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) baik diperoleh melalui dokumen ataupun wawancara dengan cara triangulasi data yang artinya pertanyaan yang sama diajukan kepada orang yang berbeda.

Ketiga, analisis, sintesis, dan interpretasi data yaitu data-data Nagari Taram pasca PRRI(Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) yang diperoleh dilapangan baik studi kepustakaan maupun wawancara dianalisa dan dirangkaikan berdasarkan sebab akibat serta dikelompokkan sesuai dengan pengelompokan yang telah ditentukan.

Keempat, adalah penulisan yang bisa dipertanggung jawabkan (historiografi), yaitu penulisan yang bisa disusun sistematis, utuh, komunikatif.

Pada tahap ini dilakukan penulis yang menjadi tujuan akhir pada sebuah studi sejarah.